
PERNIKAHAN BUGIS-MELAYU DAN CIKAL BAKAL GELAR BARU KEBANGSAWANAN DI KERAJAAN JOHOR RIAU

THE MARRIAGE OF BUGIS-MALAY AND THE INITIATION OF ARISTOCRACY IN THE KINGDOM OF JOHOR RIAU

Syahrul Rahmat

STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau
Jln. Lintas Barat Km. 8, Ceruk Ijuk, Toapaya, Bintan, Kepulauan Riau, Indonesia
syahrul28@gmail.com

Abdullah Idi dan Mohammad Syawaludin

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
Jln. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikri, Palembang, Sumatra Selatan, Indonesia
idi_abdullah@yahoo.com dan mohammadsyawaludin_uin@radenfatah.ac.id

Diterima tanggal 16 Januari 2023

Disetujui tanggal 1 November 2023

ABSTRACT

Internal conflict in the struggle for power within the Kingdom of Johor in the 18th century involved the Bugis people in the area. The Upu Daeng Brothers earned the Yang Dipertuan Muda (YDM) in the Kingdom of Johor, married Malay nobles and the sultan's sister after they successfully conquered Raja Kecik. Accordingly, these situations led to the disappearance of Bugis person's identity. In other words, Bugis descent who marry Malays no longer bear the name Daeng but Raja. The study employed historical research methods applying heuristics, source criticism, interpretation, and historiography, in which the data analysis was from the perspective of the cultural identity approach. This research revealed that the Bugis descent who lived and settled in the Johor Riau Kingdom since the 18th century were known as Bugis Malays. The new identity was due to the title 'raja,' bestowed upon the Bugis who married the Malays. The use of the new title began with the involvement of Bugis descendants in government and marriages between Bugis and Malay aristocrats.

Keywords: *ethnic identity, Bugis Malay, and Johor Riau.*

ABSTRAK

Konflik perebutan kekuasaan dalam Kerajaan Johor pada abad ke-18 ikut menyeret orang-orang Bugis yang ada di kawasan tersebut. Keberhasilan menaklukkan Raja Kecik membuat Upu Daeng Bersaudara mendapat jabatan penting dalam Kerajaan Johor sebagai Yang

Dipertuan Muda (YDM) dan dinikahkan dengan para bangsawan Melayu serta saudara perempuan sultan. Secara tidak langsung, dua hal ini membuat identitas sebagai orang Bugis perlahan menghilang. Keturunan Bugis yang menikah dengan orang Melayu tidak lagi menyandang nama daeng, melainkan nama raja. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian sejarah, yaitu heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Hasil penelitian ini dianalisis menggunakan pendekatan identitas kultural. Penelitian ini menunjukkan bahwa keturunan Bugis yang hidup dan menetap di Kerajaan Riau Johor sejak abad ke-18 dikenal sebagai Melayu Bugis. Hal tersebut berangkat dari penggunaan nama 'raja', yang merupakan satu bentuk identitas kultural baru bagi orang Bugis yang sudah berbaur dengan orang Melayu. Penggunaan nama 'raja' dimulai sejak dilibatkannya keturunan Bugis dalam pemerintahan serta pernikahan antara bangsawan Bugis dengan Melayu.

Kata kunci: identitas etnis, Melayu Bugis, dan Johor Riau.

A. PENDAHULUAN

Orang Bugis dikenal sebagai salah satu etnis perantau yang menyebar ke sejumlah wilayah di Nusantara. Kondisi ini berdampak pada identitas dan juga pemahaman terhadap nilai-nilai hidup mereka. Kajian Saripaini dan Yusriadi (2016) tentang diaspora orang-orang Bugis di Dabong, Kalimantan Barat menjelaskan bahwa orang Bugis di daerah tersebut lebih dikenal sebagai orang Melayu. Secara kasat mata, identitas mereka sebagai orang Bugis tidak lagi nampak jelas. Untuk berkomunikasi, masyarakat diaspora Bugis di Dabong sudah tidak lagi menggunakan bahasa Bugis, melainkan Bahasa Melayu.

Studi literatur menunjukkan bahwa orang-orang Bugis sudah menjadi Melayu setelah berdiaspora, tetapi narasi tersebut tidak serta merta membuat mereka meninggalkan identitas asli. Sekalipun sudah menjadi Melayu, nyatanya mereka hidup dengan identitas baru, sehingga kemudian mereka lebih dikenal dengan identitas Melayu Bugis atau Bugis Melayu.

Tulisan ini menyoroti identitas orang Bugis yang berdiaspora dengan orang Melayu di Kerajaan Johor Pahang Riau Lingga dengan tiga rumusan permasalahan. *Pertama*, terbentuknya identitas Melayu Bugis di dalam elite Kerajaan Johor Pahang Riau Lingga dimulai dengan membahas latar belakang serta bentuk keterlibatan orang-orang Bugis dalam konflik internal Kerajaan Johor. *Kedua*, mengidentifikasi proses terbentuknya identitas dengan adanya persebatian antar bangsawan Melayu Bugis. *Ketiga*, analisis akibat dari adanya persebatian antara bangsawan Melayu dan Bugis terhadap pembentukan identitas Melayu Bugis pada abad ke-18.

Wilayah barat Indonesia adalah kawasan yang kerap didatangi oleh berbagai etnik, satu di antaranya adalah etnik Bugis. Keberadaan etnik Bugis di kawasan ini dilatarbelakangi oleh berbagai alasan. Alasan tersebut dimulai dari urusan perdagangan hingga migrasi untuk menetap dan mencari penghidupan baru (Umar 2018).

Salah satu kelompok Bugis yang datang ke wilayah barat adalah rombongan Upu Daeng Bersaudara. Dinamika politik dalam pemerintahan kerajaan Luwu membuat Upu Daeng Bersaudara bersama ayah mereka, Daeng Rilakka bermigrasi ke kawasan Melayu. Di kawasan Melayu, Daeng Rilakka bersama anak-anaknya sempat mengunjungi sejumlah tempat dan menjalin hubungan dengan penguasa lokal, termasuk elite Kerajaan Johor (Rahmat 2019).

Untuk urusan perdagangan, mereka sudah menetap di sekitar istana Johor. Di kawasan Riau Kepulauan yang menjadi simpul perdagangan lokal dan internasional itu, mereka sudah mencoba untuk bersaing dengan Belanda. Selain dalam urusan perdagangan, pendatang Bugis di kawasan Semenanjung Malaya dan Riau Kepulauan juga mulai terlibat dalam urusan politik Kerajaan Johor (Pelras 1996). Perebutan kekuasaan dalam tubuh Kerajaan Johor pada akhir abad ke-18 adalah awal mula keterlibatan orang Bugis dalam politik di kerajaan tersebut (Dahlan 2014).

Pada tahun 1718, Raja Kecik yang berasal dari Minangkabau melakukan penyerangan ke Johor dalam rangka merebut tahta dari tangan Sultan Abdul Jalil Riayat Syah yang naik tahta menggantikan Sultan Mahmud Syah Mangkat di Julang (Barnard 1994). Penyerangan Raja Kecik berhasil membuatnya dinobatkan menjadi sultan menggantikan Sultan Abdul Jalil. Peristiwa ini berujung pada keterlibatan Upu Daeng Bersaudara yang pada akhirnya berhasil mengantarkan Raja Sulaiman, anak Sultan Abdul Jalil

Riayat Syah menjadi sultan di Kerajaan Johor Pahang Riau Lingga, yang di kemudian hari dikenal dengan sebutan Kerajaan Johor Riau.

Sebagai bentuk balas jasa atas bantuan pihak Bugis, Raja Sulaiman kemudian menikahkan para bangsawan Bugis tersebut dengan saudara perempuan serta anak pembesar kerajaan lainnya (Hooker 1991). Selain itu, orang-orang Bugis kemudian juga diberi jabatan sebagai Yang Dipertuan Muda (YDM) Riau. Jabatan ini memang khusus diperuntukkan bagi orang-orang Bugis yang berjasa dalam membantu Raja Sulaiman dalam mendapatkan jabatan sultan.

Keterlibatan orang Bugis dalam konflik internal Kerajaan Johor kemudian memberikan dampak terhadap aspek kultural etnik Bugis dan Melayu yang ada di kawasan tersebut. Dari aspek politik dan pemerintahan, para bangsawan Bugis mendapatkan posisi sebagai YDM Riau. Hal ini tidak hanya berlaku bagi Upu Daeng Bersaudara, tapi juga bagi keturunan-keturunannya (Fahrudin 2013). Jabatan YDM Riau diturunkan dari generasi ke generasi. Hingga berakhirnya Kerajaan Riau Lingga pascapembubaran oleh Pemerintah Belanda pada awal abad ke-20, tercatat sebanyak sepuluh orang YDM Riau yang dijabat oleh keturunan Bugis Melayu (Erman 2022; Rahmat 2019).

Melayu Bugis merupakan sebutan bagi keturunan Melayu dan Bugis yang diikat oleh pernikahan. Pernikahan orang-orang dari dua kelompok etnik ini dikenal dengan persebatian Melayu Bugis. Identitas Melayu Bugis dalam kekuasaan Kerajaan Johor Riau hingga

sekarang masih dapat ditemui dengan adanya tambahan nama “raja” di depan nama mereka. Hal ini menjadi identitas Melayu dan Bugis dari garis keturunan ayah. Penggunaan nama “raja” adalah muara dari pertemuan kultur Bugis dan Melayu. Dalam tradisi Bugis, keturunan bangsawan biasanya akan diberi tambahan nama daeng (Tamrin 2015). Sementara bagi keturunan Melayu dan Bugis di dalam konteks ini tidak lagi menggunakan nama tersebut.

Bagi orang Bugis yang sudah lama menetap di Melayu, pandangan hidup dalam siri dan *passe'* secara perlahan juga mulai luntur. Merujuk pada penelitian Mustamin, Harun, dan Nor (2021), pemahaman terhadap falsafah hidup siri dan *passe'* mulai kurang dipahami oleh masyarakat keturunan Bugis di Melayu. Hal ini berkaitan dengan perubahan sosial yang terjadi dalam tatanan hidup orang Bugis. Sekalipun demikian, orang Bugis yang menetap di Malaysia dikenal sebagai kelompok etnik yang memiliki ikatan sosial yang erat dengan daerah asal mereka. Mereka sudah lekat dengan budaya Melayu dan hidup dalam budaya tersebut, sehingga dapat dikatakan sudah menjadi Melayu. Sekalipun demikian, pada dasarnya mereka tetap bangga dengan narasi asal-usulnya (Sunarti, Haghia, dan Sari 2022).

Setidaknya terdapat dua kajian yang membahas tentang keterlibatan orang Bugis dalam kekuasaan politik Kerajaan Johor, yaitu kajian yang dilakukan oleh Daud (2016) dan Rahmat (2019). Kajian-kajian tersebut berangkat dari analisis terhadap sejumlah sumber lokal, seperti *Silsilah*

Melayu dan Bugis, Hikayat Johor dan Tuhfat Al-Nafis. Pada abad ke-18, perkawinan antara aristokrat Bugis dan Melayu yang berdampak pada perubahan dalam sistem pemerintahan kerajaan (Daud 2016). Pernikahan politik ini berangkat dari dinamika yang terjadi di Kerajaan Johor pada abad ke-18. Adanya jabatan YDM Riau untuk keturunan Bugis menjadi salah satu bentuk bahwasanya keturunan orang Bugis dapat membaur dengan kekuasaan Melayu dan bertahan untuk jangka waktu yang lama (Rahmat 2019).

Adanya pembauran kultural antara kelompok etnik Bugis dan Melayu di Kerajaan Johor pada abad ke-18 berangkat dari keberhasilan integrasi kultural. Menurut Suyono dalam Susiyanto (2020), dalam interaksi kebudayaan, terdapat dua kemungkinan, pertama terjadi konsensus ketika ada kesamaan kepentingan yang saling terintegrasi. Sebaliknya, apabila kepentingan setiap kelompok etnik tidak dapat berintegrasi, maka akan bermuara pada konflik. Lebih lanjut, menurut Linton, integrasi merupakan gejala yang saling menyesuaikan antar-unsur kebudayaan, di mana gejala itu kemudian berkembang guna mencapai kesesuaian antar-unsur secara bersama dan berujung pada *total culture* (Susiyanto 2020).

Persebatian Melayu Bugis yang melebur ke dalam kultur Melayu melahirkan identifikasi sendiri bagi keturunannya. Menurut Brewer, identifikasi sosial berangkat dari dua motif, yaitu berkaitan dengan kebutuhan untuk menjadi unik serta kebutuhan untuk dimiliki (Brewer

dalam Padilla dan Perez 2003). Sekalipun sudah berada dalam ruang budaya Melayu, orang Bugis tetap memiliki identitas yang mencirikan mereka sebagai orang yang berasal dari etnis Bugis. Identitas sosial berupa etnik, agama atau pun nasionalisme bertujuan untuk memenuhi kebutuhan simultan individu untuk inklusi dan diferensiasi. Dengan demikian, masyarakat yang terlibat dalam kelompok sosial tersebut akan termotivasi untuk mengidentifikasi diri dengan kelompok sosial yang memiliki ikatan kekerabatan, apalagi kelompok tersebut menunjukkan kekhasan yang berwujud nyata (Padilla dan Perez 2003).

Identitas Melayu Bugis pada dasarnya juga dapat dilihat sebagai sebuah konstruksi dari individu dan komunal. Adanya upaya untuk membangun identitas asli dipengaruhi oleh ketegangan politik fluktuatif serta pergeseran sosial, budaya dan ekonomi. Adanya identitas “raja” yang merupakan hasil dari persebatian Melayu Bugis adalah dampak dari faktor politik pada masa itu. Perebutan kekuasaan dalam Kerajaan Johor serta keterlibatan Upu Daeng Bersaudara dalam peristiwa tersebut nyatanya berdampak pada aspek budaya, sosial dan ekonomi di Kerajaan Johor.

Karakteristik identitas budaya menurut Mary Jane Collier dalam Syawaludin (2017) dapat dilihat dari sudut pandang komunikasi identitas budaya dan antar budaya. Beberapa diantaranya adalah upaya mengekspresikan identitas dengan simbol inti, label ataupun norma serta kualitas identitas yang dibentuk bertahan lama

dan dinamis. Hingga sekarang, nama “raja” masih digunakan bagi keturunan Melayu Bugis yang ada di wilayah Kepulauan Riau. Nama “raja” adalah warisan dari bangsawan Bugis dan Melayu yang merangkap sebagai elite penguasa Kerajaan Johor Riau bagi keturunan-keturunannya.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah yang di dalamnya terdapat empat tahapan, dimulai dari heuristik, kritik sumber, interpretasi dan historiografi (Kuntowijoyo 2013). Pada tahap heuristik dilakukan pengumpulan informasi yang berkaitan dengan peristiwa yang terjadi pada akhir abad ke-18 di Kerajaan Johor. Informasi dispesifikkan pada peristiwa perebutan kekuasaan dalam internal kerajaan, keterlibatan orang-orang Bugis, persebatian antara Bugis dengan Melayu, hingga terbentuknya identitas Melayu Bugis bagi keturunan Bugis dan Melayu. Sumber informasi mengacu pada sumber primer dan sekunder berupa buku, artikel jurnal serta sumber-sumber lain yang berkaitan dengan tema penelitian ini.

Tahapan kritik sumber adalah tahap memilih informasi yang dinilai valid, dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan tema penelitian. Salah satu kritik yang dilakukan dalam langkah ini adalah memastikan sebuah informasi itu sesuai fakta dan kebenarannya dapat diuji. Sejumlah sumber sezaman yang ditulis oleh orang lokal terkait ini adalah *Tuhfat Al-Nafis* dan *Sisilah Melayu dan Bugis*. Kedua sumber ini penting untuk menguji informasi yang dikumpulkan

berkaitan dengan beberapa sumber yang berasal dari abad ke-19 masih terpengaruh oleh historiografi tradisional (Rahmat 2021). Dalam pengerjaannya dilakukan pengujian terhadap aspek eksternal meliputi siapa penulisnya, kapan ditulis, serta bagaimana kerangka konseptual dibangun. Untuk tahap kritik internal meliputi keterlibatan penulis dengan peristiwa, apakah pihak pertama sebagai saksi atau pihak kedua yang menerima informasi dari orang lain (Hamid dan Madjid 2015).

Tahapan ketiga adalah interpretasi, pada tahap ini penulis melakukan eksplanasi dan analisis terhadap informasi-informasi yang sudah diseleksi pada tahap kritik sumber. Pada tahapan ini penulis berusaha meletakkan diri seobjektif mungkin dan meletakkan sebuah peristiwa pada konteksnya. Dalam hal ini penulis menganalisis seluruh informasi terkait keterlibatan orang Bugis di kawasan Melayu, terutama berkaitan dengan faktor politik yang kemudian berdampak pada aspek-aspek lain. Untuk itu perlu juga dilakukan analisis terhadap hubungan sebab akibat yang ditimbulkan oleh faktor tersebut. Tahap terakhir dalam penelitian sejarah adalah penulisan sejarah atau historiografi.

Lebih lanjut, penelitian ini menggunakan pendekatan identitas etnik. Perubahan maupun pembentukan identitas etnik dalam sekelompok masyarakat merupakan salah satu bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perkembangan kebudayaan. Interaksi yang intensif antara orang Bugis dengan Melayu berdampak pada integrasi kebudayaan yang berujung pada

terbentuknya sebuah identitas. Identitas yang menjadi penciri orang Bugis serta keturunannya di Kerajaan Johor Riau pada abad ke-18 ini dianalisis dengan pandangan Mary Jane Collier terkait karakteristik identitas budaya.

Selain melalui pengamatan terhadap keturunan Bugis Melayu yang saat ini ada di Kepulauan Riau (khususnya Pulau Penyengat dan Tanjungpinang), data terkait identitas keturunan Bugis di Riau Johor mengacu pada sejumlah sumber primer, baik berupa arsip maupun buku atau tulisan. Salah satunya adalah *Genealogi Daeng Celak* yang ditulis oleh Raja Fatimah dan Adnan sekitar abad ke-19 dan 20 yang tersimpan di Pulau Penyengat. Selain itu juga mengacu pada informasi terkait narasi identitas yang terbentuk pada sejumlah sumber lokal lain, seperti *Tuhfat Al-Nafis* dan *Silsilah Melayu dan Bugis* karya Raja Ali Haji.

C. HASIL DAN BAHASAN

1. Keterlibatan Bugis dalam Perebutan Tahta di Kerajaan Johor Riau pada Abad ke-18

Keberadaan orang Bugis di Melayu dan berbagai wilayah lainnya sudah berlangsung lama. Para pedagang Bugis dikenal sebagai pedagang terkemuka. Orang Bugis memiliki sejarah migrasi dan perdagangan yang panjang di seluruh Asia Tenggara, dengan populasi yang signifikan terdapat di Malaysia, Singapura, Indonesia, bahkan hingga Madagaskar dan Afrika Selatan. Selain itu, mereka juga punya reputasi sebagai pedagang dan pelaut handal (Sutherland 2017).

Kedatangan orang Bugis ke Melayu biasanya berkaitan dengan perda-

gangan. Selain itu, migrasi pada abad ke-17 juga kerap dikaitkan dengan faktor politik yang terjadi di wilayah Makassar pada abad ke-17. Peperangan yang terjadi di kawasan itu membawa orang-orang Bugis untuk bermigrasi. Migrasi orang Bugis ke berbagai wilayah tidak jarang berkembang menjadi sebuah kekuatan politik, ekonomi dan budaya baru di sebuah kawasan (Sani 2020:36).

Perang Bugis-Makassar, membawa dampak signifikan terhadap wilayah ini. Peperangan yang melibatkan Aru Palakka melawan VOC di bawah pimpinan Laksamana Speelman berujung pada kalahnya Makassar pada 1669 (Sutherland 2001:4). Menurut Andaya (1995), gugurnya Aru Palakka pada 1696 menjadi salah satu pemicu jatuhnya Makassar sebagai pusat perdagangan. Semenjak saat itu, Belanda mulai menanamkan kekuasaannya di wilayah timur Indonesia. Hal tersebut membuat orang-orang Bugis memilih untuk bermigrasi ke berbagai wilayah, termasuk kawasan Melayu dan Sumatra.

Salah satu rombongan yang bermigrasi ke kawasan Melayu pada abad ke-17 tersebut adalah Daeng Rilakka bersama anak-anaknya. Dalam perkembangannya, anak-anak Daeng Rilakka yang dikenal dengan sebutan Upu Daeng Bersaudara mulai terlibat dalam berbagai kepentingan di kawasan tersebut (Dahlan 2014; Erman 2022; Hooker 1991). Puncaknya adalah keterlibatan dalam urusan politik kerajaan Johor.

Keterlibatan orang-orang Bugis dalam urusan politik di kerajaan Johor-Riau tidak terlepas dari konflik inter-

nal yang terjadi di kerajaan tersebut. Kerajaan Johor Riau merupakan kerajaan yang sama dengan Kerajaan Johor, penyebutan Kerajaan Johor Riau berkaitan dengan dinamika politik yang terjadi dalam tubuh kerajaan tersebut. Hal ini dimulai dari wafatnya Sultan Mahmud Syah II (1685-1699) yang dibunuh oleh Megat Sri Rama (Nordin 2021).

Sultan Mahmud Syah II yang tidak memiliki keturunan membuat pihak istana menobatkan Bendahara Tun Abdul Jalil sebagai sultan pengganti dengan gelar Sultan Abdul Jalil Riayat Syah. Hanya saja, hal ini tidak berlangsung lama hingga akhirnya datang Raja Kecik. Raja Kecik datang dari Minangkabau dan mengklaim diri sebagai keturunan Sultan Mahmud Syah II.

Raja Kecik yang menganggap dirinya sebagai pewaris sah sultan menyiapkan penyerangan ke Johor. Sebelum melakukan penyerangan pada tahun 1717, ia mengumpulkan kekuatan dengan mengajak para pengikut setia Sultan Mahmud Syah II untuk bergabung. Selain mengumpulkan orang-orang yang sebelumnya menjadi pengikut setia Sultan, Raja Kecik bertemu dengan Daeng Perani dan Daeng Celak di Bengkalis sekaligus mengajak mereka untuk bergabung. Akan tetapi ajakan tersebut tidak disetujui dan mereka menyuruh Raja Kecik mengajak orang Bugis yang ada di Selangit (*Tuhfat Al-Nafis* menyebut nama daerah ini Langat), sekaligus menyiapkan perlengkapan (Hooker 1991).

Berbeda dengan *Tuhfat Al-Nafis*, versi Netscher (2002:80) bercerita

sebaliknya. Ketika berada di Bengkalis untuk persiapan menyerang Johor, Raja Kecil didatangi oleh pengembara Bugis. Daeng Perani dan Daeng Celak yang memimpin rombongan tersebut menyatakan kesediaannya untuk ikut menyerang Johor. Sebagai imbalan dari keberhasilan itu dimufakati Daeng Perani akan diangkat sebagai Yang Dipertuan Muda Johor dan Raja Kecil sebagai Yang Dipertuan Besar.

Lebih lanjut, karena bantuan dari Upu Daeng Bersaudara tidak kunjung datang, maka kemudian Raja Kecil melanjutkan penyerangan dengan melewati Selat Singapura. Penyerangan Raja Kecil kemudian membuahkan hasil dengan mengambil alih tahta dari tangan Sultan Abdul Jalil Riayat Syah (Adil 1980; Barnard 1994). Keberhasilan ini berujung pada dinobatkannya Raja Kecil menjadi sultan dengan gelar Sultan Abdul Jalil Rahmat Syah.

Untuk mendapatkan kuasa atas Kerajaan Johor, dapat dikatakan Raja Kecil memanfaatkan *ascribed status* dengan klaim sebagai keturunan sah dari Sultan Mahmud Syah II. *Ascribed status* adalah sebuah status yang ada pada seseorang karena faktor kelahiran ataupun keturunan. Artinya, status ini tidak didapatkan melalui usaha, akan tetapi status tersebut seolah terberi atas dirinya (Rambe et al. 2019: 46). Klaim yang diberikan oleh Raja Kecil cukup kontroversial, sebab sebagian besar sumber-sumber Melayu menyebutkan kalau Sultan Mahmud Syah II meninggal tanpa meninggalkan keturunan. Sekalipun demikian, tidak dipungkiri bahwa kemudian klaim tersebut mampu menggalang kekuatan

dengan melibatkan orang-orang yang dahulu setia pada Sultan Mahmud untuk bergerak mengambil tahta sebagai sultan.

Setelah menaklukkan Johor, Raja Kecil menikahi anak Bendahara atau Sultan Abdul Jalil. Pada awalnya, Raja Kecil bertunangan dengan Tengku Tengah, akan tetapi pertunangan tersebut kemudian diputuskan oleh Raja Kecil dan beralih dengan menikahi Tengku Kamariah yang merupakan saudara dari Tengku Tengah. Pada kejadian ini, pihak Sultan Abdul Jalil tidak mampu untuk berbuat apa-apa, karena Raja Kecil waktu itu sudah menjadi sultan. Akan tetapi, hal ini membuat Tengku Tengah dan Raja Sulaiman tidak senang, karena merasa Raja Kecil sudah melukai harga diri mereka (Adil 1980). Menurut Netscher (2002), versi Sejarah Melayu ini dinilai terkesan romantis.

Konflik antara Raja Kecil dengan pihak Sultan Abdul Jalil tidak pernah berakhir. Kematian Sultan Abdul Jalil Riayat Syah disebutkan tidak terlepas dari keterlibatan Raja Kecil. Ia menyuruh Nakhoda Sekam untuk membunuh Sultan Abdul Jalil dalam sebuah pelayaran menuju Riau bersama anak-anaknya Raja Sulaiman, Tengku Tengah, Tengku Mandak dan Tengku Kamariah. Peristiwa yang terjadi pada 1720 itu berujung dengan terbunuhnya Sultan Abdul Jalil ketika menjalankan wirid usai sembahyang subuh (Nordin 2021). Sultan Abdul Jalil wafat dan dimakamkan di Teluk Kandang dan dikenal dengan sebutan Marhum Mangkat di Kuala Pahang (Adil 1980).

Peristiwa terbunuhnya Sultan Abdul Jalil memicu kemarahan Raja

Sulaiman. Setelah berdiskusi dengan Datuk Bendahara, pada tahun 1721 ia mengirimkan utusan untuk mengantarkan surat pada Upu Daeng Bersaudara yang saat itu berada di Matan (Kalimantan). Dalam surat tersebut ia menceritakan semua yang sudah terjadi dan mereka alami atas perbuatan Raja Kecik (Adil 1980). Naskah *Silsilah Melayu dan Bugis* menyebutkan, surat yang dikirimkan oleh Raja Sulaiman berisi permintaan kepada Upu Daeng Bersaudara untuk membantu mengambil kembali kehormatan mereka dari tangan anak Raja Minangkabau atau Raja Kecik (Wati 1973).

Komitmen untuk ikut memperjuangkan permintaan Raja Sulaiman disampaikan oleh Daeng Marewa sebagai sebuah sumpah. Sumpah yang dimuat dalam *Tuhfat Al-Nafis* itu berbunyi “*Jika belum aku ambil Riau dengan segala takluk daerahnya dan aku serahkan kepada Raja Sulaiman, aku haramkan menjejak tanah Bugis atau aku mati*” (Hooker 1991 :200). Setelahnya, Upu Daeng Bersaudara, yang terdiri atas Daeng Perani, Daeng Menambun, Daeng Marewah, Daeng Celak, dan Daeng Kemasi yang juga diikuti oleh sejumlah bangsawan Bugis lain, seperti, Daeng Menampok, Daeng Masuru, dan Daeng Mengetok bertolak menuju Riau (Adil 1980).

Kuat dugaan bahwa pelibatan orang Bugis dalam hal ini berkaitan dengan kekuatan mereka dalam peperangan. Bugis disebutkan sebagai salah satu kelompok etnik asal Sulawesi Selatan yang menjadi kekuatan penting di Semenanjung Malaya (Barnard 1994). Sebelum oleh Raja Sulaiman,

orang-orang Bugis bahkan juga ikut perang diminta oleh Raja Kecik untuk menyerang Johor. Kondisi cukup menjelaskan bahwa orang-orang Bugis di kawasan Melayu memiliki posisi yang cukup penting.

Sekalipun demikian, agaknya motif keterlibatan orang Bugis dalam hal ini belum begitu kuat. Sumber-sumber Melayu, seperti *Tuhfat Al-Nafis* dan *Silsilah Melayu dan Bugis* hanya menyebutkan para Upu Daeng Bersaudara geram mendengar penuturan Raja Sulaiman melalui suratnya. Sederhananya, serasa tidak mungkin keputusan berperang tidak dilandasi alasan atau motif yang kuat. Jika dirujuk pada pendapat Netscher terkait kesepakatan antara Raja Kecik dengan Daeng Perani di Bengkalis, agaknya lebih masuk akal mereka menerima permintaan tersebut.

Sebelumnya, saat penyerangan ke Johor, Raja Kecik meninggalkan Orang Bugis yang awalnya sudah bersepakat. Raja Kecik menganggap pasukannya serta bantuan Orang Selat sudah cukup tanpa harus melibatkan Orang Bugis (Dahlan 2014). Karenanya, keterlibatan Orang Bugis dalam tuntutan balas Raja Sulaiman terhadap Raja Kecik dapat dikaitkan dengan motif balas dendam (Rahmat 2019). Kesediaan untuk menyerang Raja Kecik dapat dikatakan juga berkaitan dengan motif pribadi pihak Bugis yang diakomodasi oleh permintaan Raja Sulaiman sebagai sebuah legalitas.

Penyerangan yang dilakukan pihak Bugis terhadap Raja Kecik di Riau terjadi pada sejumlah titik, seperti Pengujan, Pulau Bayan, Pulau Penyengat dan Tanjung Bemban.

Penyerangan yang terjadi selama dua hari itu membuat Raja Kecil tersudut hingga akhirnya mundur ke Lingga (Adil 1980; Hooker 1991). Kekuasaan Raja Kecil setelahnya tidak pernah berjalan lancar, ia selalu dirongrong oleh pihak Bugis. Tidak hanya itu, Orang Laut yang pada awalnya memihak Raja Kecil juga mulai meninggalkannya lantaran kehilangan kepercayaan (Barnard 1994).

Raja Kecil akhirnya benar-benar dikalahkan pada 4 Oktober 1722. Penyerangan yang dipimpin oleh Daeng Marewa untuk mengambil alat-alat kebesaran kerajaan menjadi akhir dari kekuasaan Raja Kecil sebagai Sultan Johor Riau. Masa ia menjabat sebagai sultan tergolong singkat, hanya sekitar tiga tahun. Setelah kekalahan tersebut, Raja Kecil mendirikan Kerajaan Siak. Sementara Raja Sulaiman dinobatkan sebagai Sultan Johor Riau dengan gelar Sultan Sulaiman Badrul Alam Syah (Adil 1980; Barnard 1994; Nordin 2021).

Narasi sejarah yang ditulis oleh orang Melayu dan juga keturunan Bugis ini terkesan sangat subjektif. Sosok Raja Kecil kerap digambarkan sebagai seorang pengganggu yang datang untuk mengambil alih kekuasaan yang sah dari tangan Sultan Abdul Jalil. Narasi-narasi tersebut cenderung menyudutkan sosok Raja Kecil. Menurut Netscher (2002), Sejarah Melayu ditulis oleh orang Melayu menyangkut Raja Muda, sudah pasti juga ditulis oleh orang Bugis. Sementara di dalam penulisan sejarah itu tidak ada pihak ketiga yang tidak berpihak atau objektif.

Terlepas dari benar atau salahnya sebuah peristiwa, kronik perebutan

kekuasaan ini kerap ke luar dari prinsip-prinsip moral. Upaya pembunuhan terhadap Sultan Abdul Jalil adalah salah satu bentuk bagaimana moral dalam sebuah kekuasaan tidak begitu penting. Menurut Machiavelli, perbincangan terkait sejarah dan politik pada dasarnya berada pada konteks manusiawi dan abai terhadap pertimbangan moral dalam sudut pandang normatif. Menurutnya, sebuah negara yang berada di bawah prinsip-prinsip moral akan runtuh. Oleh karenanya, untuk sebuah keberhasilan maka seorang pemimpin harus mengabaikan pertimbangan moral lalu mengandalkan berbagai cara atas segala sesuatu atas kekuatan dan kelicikan (Ikhwan 2016).

Sayangnya, tindak tanduk Raja Kecil selama menjabat sebagai sultan berubah menjadi bumerang bagi dirinya sendiri. Ketidakpuasan dan ketidaksenangan dari pihak Sultan Abdul Jalil kemudian berdampak pada kuasa yang dipegangnya. Keterlibatan kuasa lain dalam sebuah konflik dalam kerajaan pada dasarnya bukanlah hal baru. Bugis dengan kekuatan yang cukup mapan di kawasan Melayu kemudian menjadi bagian dari siklus peradaban di Kerajaan Johor Riau, mulai dari lahir, tumbuh, berkembang, kemunduran, dan kehancuran.

2. Menjadi Yang Dipertuan Muda dan Pernikahan Bangsawan Melayu dan Bugis

Usai menaklukkan Raja Kecil dan kekuasaan mulai beralih ke Sultan Sulaiman Badrul Alam Syah, pihak Melayu siap untuk membalas budi pada Upu Daeng Bersaudara. Pada awalnya, para Upu Daeng tersebut menolak

untuk menjadi Yang Dipertuan Muda. Daeng Perani beralasan usianya yang sudah cukup tua, Daeng Menambun beralasan harus kembali ke Kalimantan untuk membantu penguasa di sana, Daeng Celak belum bisa menerima jabatan selama masih ada saudara tertuanya, Daeng Kemasi mengatakan bahwa dia sama sekali tidak berniat untuk menjadi penguasa di kawasan Melayu, sementara Daeng Marewa mengatakan tidak mau menjadi Yang Dipertuan Muda jika harus berpisah dengan saudara-saudaranya (Hooker 1991).

Sebagaimana tertulis dalam *Silsilah Melayu dan Bugis*, sebelumnya pihak Bugis menjalin kesepakatan dengan Raja Sulaiman ketika diminta untuk membantu melawan Raja Kecil. Dalam kesepakatan itu Daeng Perani menawarkan jika pihaknya berhasil memenangkan perlawanan terhadap Siak, maka pihak Bugis akan menjadi Yang Dipertuan Muda dan Raja Sulaiman menjadi Yang Dipertuan Besar. Raja Sulaiman bebas memilih siapa yang akan menjabat sebagai Yang Dipertuan Muda di antara Bugis bersaudara. Selain itu, jabatan itu diminta untuk diwariskan secara turun-temurun pada keturunan Bugis (Wati 1973).

Setelah pembicaraan, antara sesama pihak Bugis dengan Sultan Sulaiman, akhirnya Daeng Marewa disepakati sebagai Yang Dipertuan Muda (YDM) Riau I (1722-1728). Pengukuhan Daeng Marewa sebagai Yang Dipertuan merupakan titik awal dari ikatan kesetiaan antara Bugis dan Melayu. Dalam pelantikannya, Daeng Marewa menyampaikan sumpah dalam

mengemban amanah, hal tersebut ditulis dalam *Tuhfat Al-Nafis* yang berbunyi “*Lihatlah Sultan Sulaiman Badrul Alam Syah, akulah Yang Dipertuan Muda yang memerintah kerajaanmu. Barang yang tiada suka melintang di hadapanmu, aku bujurkan. Barang yang semak berduri di hadapanmu, aku cucikan*” (Hooker 1991:216).

Daeng Marewa diberi gelar Kelana Jaya Putera oleh Sultan Sulaiman Badrul Alam Syah. Sultan juga meminta agar mereka menjadi saudara dunia akhirat. Oleh karenanya, Sultan memberi pula gelar tambahan kepada Daeng Marewa, yaitu Yang Dipertuan Muda Sultan Alauddin Syah ibni Upu (Ahmad 1985).

Setelah menjalin ikatan politik, selanjutnya Sultan Sulaiman menjalin ikatan kekeluargaan dengan pihak Bugis. Ikatan ini dilakukan dengan menikahkan para bangsawan Bugis dengan keturunan pembesar Kerajaan Johor maupun saudara perempuan Sultan. Hal ini membuat hubungan antara Bugis dan Melayu menjadi semakin intensif, tidak hanya dalam urusan politik, tapi juga dalam urusan yang lebih pribadi dalam bentuk kekeluargaan.

Pernikahan antara bangsawan Melayu dan Bugis ini dilakukan setelah pengukuhan Daeng Marewa sebagai YDM Riau. Daeng Marewa sendiri menikah dengan Tun Encik Ayu yang merupakan putri Tumenggung Abdul Jamal. Daeng Perani menikah dengan Tengku Tengah (juga dikenal dengan nama Tengku Irang) yang merupakan saudara perempuan Sultan Sulaiman. Daeng Celak dinikahkan dengan

Tengku Mandak (bergelar Tengku Empuan) yang merupakan saudara dari Sultan Sulaiman. Selanjutnya, Daeng Menampuk dinikahkan dengan Tun Tipah. Daeng Massuro dinikahkan dengan Tun Kecil yang merupakan saudara sepupu Sultan Sulaiman. Daeng Mangngatuk dinikahkan dengan saudara sepupu sultan lainnya, yaitu Tun Inah (Hooker 1991; Rahmat 2020).

Jika dirujuk pada naskah *Silsilah Melayu dan Bugis*, terdapat beberapa perbedaan nama dari tokoh-tokoh tersebut. Dalam *Tuhfat Al-Nafis*, bangsawan Bugis yang menikah dengan Tun Inah adalah Daeng Mangngatuk, sementara dalam *Silsilah Melayu dan Bugis* yang menikah dengan Tun Inah adalah Daeng Monto (Wati 1973). Besar kemungkinan Daeng Mangngatuk dan Daeng Monto adalah orang yang sama. Sementara itu, dalam *Hikayat Johor* Daeng Mangngatuk/ Monto/ Mangeto disebut menikah dengan Tun Aisyah (Daud 2016). Cukup sulit membuktikan apakah Tun Inah adalah orang yang sama dengan Tun Aisyah. Sekalipun demikian, kondisi ini bisa saja benar, sebab beberapa tokoh sebelumnya juga memiliki nama lain, seperti Tengku Tengah dengan nama Tengku Irang dan Tengku Mandak dengan nama lain Tengku Empuan.

Adanya pernikahan antara Bangsawan Bugis dan Melayu memberikan keuntungan tersendiri bagi orang Bugis (Daud 2016). Jika merujuk pada syarat yang ditawarkan oleh Daeng Perani untuk menjadikan salah satu Upu Daeng Bersaudara sebagai YDM Riau, maka pernikahan antara etnik adalah salah satu cara untuk mempertahankan

hal tersebut. Pihak Bugis meminta agar jabatan YDM Riau dipegang oleh orang-orang Bugis dan keturunannya. Dengan keturunan yang juga memiliki darah Melayu, maka hal tersebut menjadi upaya untuk memperkuat pengaruh dan kuasa dalam pemerintahan.

Secara genealogis, jabatan YDM Riau hingga berakhirnya Kerajaan Riau Lingga pada awal abad ke-20 diisi oleh keturunan Bugis atau pun Melayu Bugis. YDM Riau I dijabat oleh Daeng Marewah (1722-1728) dan kemudian digantikan oleh adiknya YDM Riau II Daeng Celak (1728-1745), YDM Riau III dijabat oleh Daeng Kemboja (1748-1777) yang merupakan anak dari Daeng Perani. Selanjutnya, YDM Riau IV dijabat oleh Raja Haji (1777-1784) yang merupakan anak dari Daeng Celak. YDM Riau V dijabat oleh Raja Ali (1784-1806) yang merupakan anak dari Daeng Kemboja.

Jabatan YDM Riau VI dijabat oleh Raja Ja'far (1806-1831) yang merupakan anak Raja Haji YDM Riau IV. Seterusnya, untuk YDM Riau VII, VIII dan IX secara berurutan dijabat oleh anak Raja Ja'far, yaitu Raja Abdurrahman (1833-1843), Raja Ali (1845-1857) dan Raja Abdullah (1857-1858). Terakhir adalah Raja Muhammad Yusuf Al-Ahmadi sebagai YDM Riau X, ia merupakan anak dari Raja Ali (YDM Riau VIII) dan cucu dari Raja Ja'far (YDM Riau VI), dan cicit dari Daeng Celak yang merupakan YDM Riau II (Rahmat 2019).

Jabatan YDM bagi Orang Bugis yang dianggap berjasa kepada Sultan Sulaiman biasanya diberikan sultan kepada menteri-menteri atau Majelis

Orang Kaya Melayu. Masuknya orang Bugis ke dalam sistem pemerintahan lambat laun membuat munculnya oposisi dari orang-orang Melayu yang tidak lagi mendapat kekuasaan (Melay 1999). Pada dasarnya, kondisi ini membuat Sultan Sulaiman berada dalam kondisi serba salah, sebab di satu sisi ia membutuhkan keberadaan orang Bugis, dan di sisi lain ia tidak mampu mengendalikan dan mengakomodasi pihak-pihak yang sejak awal menjadi bagian dari pemerintahan kerajaan.

Selain di Johor Riau, Upu Daeng Bersaudara juga menjalin hubungan pernikahan dengan bangsawan Melayu di wilayah barat Kalimantan. Di Mempawah, Daeng Menambun di kemudian hari malah menjadi sultan. Melalui keberhasilan mereka membantu para sultan di kawasan Melayu, lambat laun para bangsawan Bugis mulai membangun jaringan kekuasaan melalui pernikahan politik dengan putri-putri kerajaan Melayu, seperti Johor, Matan, Sambas dan Mempawah (Erman 2022).

Sekalipun demikian, keberadaan Bugis dalam inti pemerintahan Kerajaan Johor Riau membawa pengaruh yang cukup besar dalam perkembangan kerajaan tersebut. Sebagai hubungan timbal balik, orang-orang Bugis juga memperoleh keuntungan melalui kuasa dan pengaruh yang mereka miliki. Hanya saja, menurut Andaya (1975), Sultan Sulaiman disebut sangat bergantung terhadap para pemimpin Bugis. Hal ini membuat berkurangnya kepercayaan orang Melayu pada Sultan Sulaiman. Orang Kaya Melayu mulai meninggalkan istana dan mencari perlindungan

pada pemimpin Melayu lain yang ada di Pahang dan Terengganu.

Sebagai perbandingan, keberadaan Bugis di kawasan Melayu tidak hanya ada dalam kekuasaan Kerajaan Johor Riau. Sejumlah kerajaan lain yang ada di wilayah Kalimantan dan Semenanjung Malaya pun disebutkan memiliki hubungan politis dengan orang-orang Bugis. Hubungan tersebut lebih kurang sama dengan yang terjadi di Kerajaan Johor Pahang, hanya saja perbedaannya adalah identitas yang terbentuk.

Di Kedah Malaysia, riwayat hubungan antara orang Bugis dan Melayu berbanding terbalik dengan yang terjadi di Johor. Pada awalnya, hubungan pernikahan sudah terjalin sejak wafatnya Sultan Muhyidin Mansur Shah pada 1661 dan kemudian digantikan oleh putranya Tunku Dhiauddin bergelar Sultan Dhiauddin Mukarram Shah. Tunku Safura Negara, anak dari pernikahan Sultan Dhiauddin dengan Wan Jingga, kemudian dipersunting oleh anak seorang raja Bugis di Makassar yang bernama Raja Juang Tawa. Dari pernikahan tersebut kemudian lahir seorang anak lelaki bernama Tunku Ngah Putra. Setelah mangkatnya beberapa orang pembesar kerajaan yang akan menjabat sebagai sultan, orang-orang besar Kedah merasa bimbang akan menyerahkan kekuasaan pada Tunku Ngah Putra yang merupakan keturunan Bugis, sehingga mereka melantik Tunku Ata' Allah yang merupakan keturunan lain dari Sultan Dhiauddin dari istri bernama Sepa Cendana sebagai Sultan (Ahmad 2016).

Kekecewaan Tunku Ngah Putra karena tidak dilantik sebagai sultan

membuatnya memilih kembali ke Bugis. Setelah sembilan tahun, pada Februari 1687 ia kembali dengan membawa armada perang di bawah pimpinan Raja Taguk Kurnam. Pertempuran tidak dapat dielakkan, pasukan Bugis menyerang Kedah melalui Sungai Merbok. Pertempuran tersebut berujung pada terbunuhnya Raja Taguk Kurnam, pasukan Bugis pun kemudian tercerai berai. Tunku Ngah Putra melarikan diri ke Bruas lalu ke Kelang hingga berakhir di Selangor. Hanya saja, pada masa-masa setelahnya, kekuatan Bugis juga dimanfaatkan oleh beberapa puak yang saling bertentangan dalam pemerintahan Kerajaan Kedah. Pada 1771, armada Bugis menyerang Kedah bersama sejumlah orang Kedah yang melakukan pemberontakan kepada sultan (Ahmad 2016).

Akhir dari konflik internal di Kedah tidak serta merta membuat orang-orang Bugis menjadi penguasa di Kedah. Sebab pada peristiwa tersebut pihak kerajaan meminta bantuan pada Inggris. Karenanya, sekalipun Bugis cukup banyak terlibat dengan elite pemerintahan di Melayu, tidak semuanya berakhir sebagaimana yang terjadi di Johor. Sebagaimana disinggung di awal, kasus yang terjadi Johor tidak hanya membawa mereka masuk ke dalam pemerintahan, tapi juga terhadap pembentukan identitas kultural Bugis Melayu.

3. Identitas Melayu Bugis di Kerajaan Johor Riau

Sebagaimana disinggung pada bagian-bagian sebelumnya, orang Bugis dikenal sebagai pedagang dan pelaut.

Migrasi orang Bugis dari negeri asalnya berakhir hampir di seluruh wilayah di Indonesia. Di tempat-tempat tersebut, mereka terus melanjutkan dan membangun kehidupan mereka yang baru. Diaspora orang Bugis di wilayah barunya kerap menghadirkan berbagai dinamika, mulai dari sosial, budaya, ekonomi, maupun politik.

Di wilayah Bengkulu, diaspora Bugis berkaitan dengan penguasaan Inggris atas wilayah itu sejak 1685. Orang-orang Bugis sengaja diundang dan dipekerjakan sebagai pengawas penanam lada di wilayah itu. Orang Bugis punya reputasi sebagai orang terpercaya dan pemberani. Oleh Inggris, salah satu orang Bugis, Daeng Mauppa, ditunjuk sebagai kapiten Bugis. Ia kemudian menikahi saudara perempuan Sultan Inderapura dan punya dua anak, yaitu Sultan Endeh dan Daeng Mabela. Keduanya menggantikan ayahnya sebagai pemimpin komunitas Bugis di wilayah itu pada akhir abad ke-17 (Andaya 1995).

Diaspora Bugis di Pagatan, Tanah Bumbu juga sudah dimulai sejak kedatangan mereka pada abad ke-18. Dalam sejarahnya, orang Bugis di kawasan ini tetap menjaga identitas mereka sebagai Bugis, walau sudah berada jauh dari Tanah Bugis. Pada abad ke-20, identitas Bugis mereka terwujud dengan dibentuknya kampung-kampung Bugis di sepanjang pesisir Pagatan (Hendraswati, Dalle, dan Jamalie 2017).

Berbagai faktor, mulai dari faktor internal dan eksternal dari diaspora Bugis di Bali telah membawa perubahan terhadap etnik tersebut dari masa ke masa. Hingga pertengahan

abad ke-19, identitas Bugis di wilayah Bali begitu kental. Ketika Belanda mulai masuk ke Bali, identitas Bugis mereka mulai bermetamorfosis menjadi Islam. Pascakemerdekaan, muncul identitas keindonesian dan menggeser dua identitas sebelumnya. Sementara pada era reformasi, identitas Islam kembali menguat, sementara identitas Bugis menjadi sekunder (Suwitha 2017).

Untuk lingkup spasial Kerajaan Johor Riau, sejumlah penelitian maupun narasi sejarah yang membahas tentang orang Bugis kebanyakan membahas tentang keterlibatan mereka dalam perebutan kekuasaan. Narasi ini banyak muncul dalam tulisan sejarah naratif maupun kritis. Sebagai dampak dari keterlibatan itu pun kebanyakan fokus pada 'keuntungan' yang mereka peroleh dengan mendapatkan jabatan penting di pemerintahan.

Lebih lanjut, adanya hubungan kekerabatan yang dijalin melalui pernikahan adalah titik tolak terbentuknya identitas kultural bagi orang Bugis di Melayu. Secara tidak langsung, pernikahan antara bangsawan Bugis dengan bangsawan Melayu berdampak pada identitas kultural mereka. Menjadi bagian dari kultur masyarakat Melayu, terutama dalam wilayah kekuasaan Kerajaan Johor Riau memberikan mereka identitas baru, walaupun sebagian catatan masih menyebutkan mereka sebagai penguasa Bugis.

Identitas Bugis Melayu adalah identifikasi terhadap keturunan bangsawan Bugis dengan Melayu yang terbentuk sejak penabalan Daeng Marewa sebagai YDM Riau I.

Pembentukan identitas baru mulai terlihat semenjak menjabatnya Raja Haji sebagai yang Dipertuan Muda IV. Secara genealogis, Raja Haji merupakan anak dari bangsawan Bugis Daeng Celak dengan bangsawan Melayu. Dalam hal ini, sekalipun keturunan bangsawan Bugis, Raja Haji tidak lagi menggunakan nama depan 'daeng' berbeda dengan pendahulunya (Rahmat 2019).

Penggunaan nama daeng bagi orang Bugis sudah menjadi kebudayaan yang melekat dalam diri masyarakat. Dalam tradisi orang Bugis Makassar, nama daeng bisa didapatkan melalui dua acara. Cara pertama adalah melalui pemberian kepada orang yang dianggap berjasa, atau berhasil karena kejujuran, kebaikan atau kepintaran. Sementara cara kedua adalah didapatkan secara biologis (Tamrin 2015).

Ketegangan yang sebelumnya terjadi antara pihak Melayu dengan Bugis mulai luntur pada masa Raja Haji menjabat sebagai YDM Riau. Kebijaksanaannya sebagai pemimpin serta semangat perjuangan dengan mempertahankan nilai-nilai kultural membuat ia mampu mempersatukan dunia Melayu. Oleh *Tuhfat Al-Nafis*, hal tersebut dinyatakan melalui kalimat "*sekarang anak Bugis sudah menjadi Melayu*" (Melay 1999, 59).

Pembentukan identitas budaya keturunan Bugis dan Melayu bertolak dari keturunan Daeng Celak yang dalam perkembangannya menjadi penerus sebagai YDM Riau. Keberhasilan Raja Haji dalam mempersatukan orang Melayu dan Bugis yang kerap berseberangan pandangan sejak awal,

lambat laun mulai melahirkan sebuah pengakuan dari masyarakat. Sikap nasionalisme Raja Haji dengan melakukan perlawanan terhadap bangsa Eropa membuat persepsi orang-orang Melayu berubah. Jika sebelumnya orang Bugis tidak disenangi, terutama sejak adanya ketergantungan Sultan Sulaiman pada mereka di masa lalu, maka dalam perkembangannya Raja Haji dianggap sebagai pemersatu bangsa Melayu untuk kepentingan bersama.

Sekalipun *Tuhfat Al-Nafis* menyebutkan anak Bugis sudah menjadi Melayu, akan tetapi identitas mereka sebagai keturunan Bugis masih mudah diidentifikasi. Menjadi Melayu, sebagaimana yang disebut dalam *Tuhfat Al-Nafis*, dapat dikatakan belum total. Penggunaan nama “raja” sebagai pengganti nama daeng adalah salah satu bentuk mengapa Bugis disebutkan membangun sebuah identitas sendiri. Ekspresi dalam pembentukan identitas kultural Bugis Melayu diwujudkan dengan penggunaan nama “raja” sebagai label. Ekspresi identitas keturunan Bugis Melayu melewati proses yang panjang. Integrasi sosial dalam membentuk identitas kultural adalah gejala yang saling menyesuaikan antarunsur kebudayaan dan tentu saja membutuhkan waktu. Gejala penyesuaian itu berkembang secara progresif untuk membentuk total kultur yang kemudian menjadi identitas keturunan Melayu Bugis (Susiyanto 2020).

Pernikahan bangsawan Bugis dengan Melayu di Kerajaan Johor Riau mulai membentuk identitas sendiri. Sebagian pembesar di kerajaan ini

pada umumnya merupakan keturunan Daeng Celak. Para keturunan Daeng Celak tidak lagi menggunakan nama daeng, melainkan “raja”. Identitas ini kemudian juga diturunkan pada keturunan-keturunannya, baik laki-laki maupun perempuan (Mansur 1983). Genealogis ini lama-kelamaan membentuk kelompok. Sebagian besar kelompok ini berada di Pulau Penyengat Riau. Hal ini berkaitan dengan kedudukan YDM Riau yang berada di pulau tersebut. Pulau Penyengat tercatat sebagai pusat kekuasaan YDM pada masa Raja Ja’far (1808). Sebelum di Penyengat, pusat pemerintahan YDM berada di Hulu Riau, Pulau Bayan, dan akhirnya Penyengat. Sementara itu, pemerintahan sultan atau Yang Dipertuan Besar (YDB) berada di Daik Lingga (Fahrudin 2013).

Identitas Bugis Melayu di dalam Kerajaan Johor Riau bertahan sangat lama, bahkan hingga masa sekarang. Hal ini memperlihatkan salah satu poin penting dari karakteristik pembentukan identitas budaya Collier yang berdasarkan kualitas. Identitas yang terbentuk sejak abad ke-18 tersebut bertahan selama ratusan tahun. Sekalipun secara politis tidak lagi punya andil dalam pemerintahan pasca-berakhirnya kerajaan ini pada awal ke-20, akan tetapi eksistensi dan penggunaan nama ini masih bertahan.

Tidak hanya itu, bahkan keberadaan mereka cukup dinamis. Pada akhir abad ke-19, jabatan sultan mulai beralih pada keturunan Bugis, yaitu dengan naik tahtanya Raja Abdurrahman. Raja Abdurrahman merupakan anak dari YDM Riau X,

Raja Muhammad Yusuf Al-Ahmadi, dengan Embung Fatimah (Kadir 2008). Sejak awal jabatan YDB adalah jabatan yang diisi oleh keturunan Melayu dan jabatan YDM diisi oleh keturunan Bugis (Fahrudin 2013). Hanya saja pada periode akhir masa Kerajaan Riau Lingga, jabatan YDB dijabat oleh anak dari Raja Muhammad Yusuf Al-Ahmadi, yaitu Raja Abdurrahman yang kemudian bergelar Sultan Abdurrahman Muazam Syah.

Selain dinamika politik, Kerajaan Riau Lingga juga mengalami dinamika kebudayaan. Keterlibatan etnik Bugis dalam lingkaran kebudayaan Melayu berdampak pada terjadinya integrasi antara dua kebudayaan. Dinamika kebudayaan tersebut berdampak pada terbentuknya identitas kultural bagi keturunan Melayu dan Bugis. Identitas keturunan Melayu dan Bugis yang terlihat melalui identifikasi penggunaan nama “raja” pada dasarnya berkaitan dengan unsur politis di Kerajaan Johor Riau yang kemudian menjadi Kerajaan Riau Lingga. Berawal dari membaur ke dalam sistem pemerintahan, identifikasi diri sebagai keturunan Bugis Melayu, hingga penabalan Raja Abdurrahman yang merupakan keturunan Bugis sebagai sultan merupakan bentuk kebudayaan itu bersifat adaptif.

Sebagai pembanding, untuk konteks diaspora Melayu di Makassar, Sutherland (2001) menyebutkan “menjadi Melayu” berarti memiliki paspor budaya dan sosial, memberikan akses potensial ke jaringan perdagangan diaspora dan keuntungan politik dari garis keturunan yang dihormati. Kombinasi kemelayuan dengan identitas yang lebih berlandaskan

lokalitas menawarkan kesempatan untuk mengapitalisasikan hubungan yang lebih luas ini, tanpa meninggalkan solidaritas yang lebih terfokus secara sempit.

Riwayat historis yang panjang antara Melayu dan Makassar, menurut Sutherland menjadi salah satu bentuk bagaimana keberlanjutan hubungan antara Melayu dengan Makassar terjalin (Sutherland 2001:418). Kasus yang terjadi di Makassar pada dasarnya hampir sama dengan yang terjadi di wilayah Johor Riau. Bugis di Melayu maupun Melayu di Makassar sama-sama mengalami diaspora. Pada wilayah masing-masing, keduanya sama-sama berhubungan dengan elit penguasa setempat dan terlibat dalam berbagai aspek, seperti politik, ekonomi serta kebudayaan.

Kebudayaan adalah sesuatu yang laju dan perkembangannya tidak bisa dibatasi. Budaya merupakan proses dari refleksi pemikiran manusia yang berinteraksi dengan manusia lain. Selain itu, budaya sifatnya adaptif yang diwariskan dari generasi ke generasi dalam sebuah proses enkulturasi. Budaya tidak berdiri sendiri, melainkan di dalamnya terdapat rangkaian paket makna serta simbol (Syawaludin 2017).

Berawal dari integrasi kultural, Bugis dan Melayu membentuk sebuah identitas baru bagi keturunannya. Proses enkulturasi dari generasi Raja Haji hingga masa sekarang merupakan sebuah pewarisan kebudayaan yang di dalamnya terkandung nilai-nilai historis. Menjabatnya Sultan Abdurrahman Muazam Syah II pada akhir abad ke-19 dapat dikatakan merupakan sebuah perubahan jika

dirujuk pada sistem yang dibangun sejak awal. Hal tersebut merupakan sesuatu yang wajar, mengingat kebudayaan yang bersifat adaptif. Di dalamnya diakomodasi banyak hal, mulai dari lingkungan, peristiwa hingga ide manusia dalam satu kesatuan utuh.

D. SIMPULAN

Diaspora Bugis di Melayu, yang dalam konteks ini pada kerajaan Johor Riau, memiliki corak yang berbeda dengan wilayah lain. Diaspora yang secara dominan terjadi di lingkungan bangsawan tersebut lambat laun membuat identitas kultural baru bagi keturunan Bugis dan Melayu. Jika Bangsawan Bugis identik dengan nama daeng dan Melayu dengan nama tengku sebagai simbol, maka keturunan Melayu Bugis menggunakan nama “raja”.

Identitas ini juga tidak berlaku umum, sebab tidak semua keturunan bangsawan Bugis dan Melayu yang ada di kawasan Melayu mutlak menyandang nama tersebut. Hal ini secara spesifik ditemukan pada garis keturunan Raja Haji bin Daeng Celak. Secara genealogis, dapat dikatakan hampir semua keturunan Daeng Celak dan beberapa kerabat Upu Daeng Bersaudara menggunakan nama tersebut. Tidak hanya itu, merujuk pada riwayat YDM Riau setelah Daeng Kemboja (YMD Riau III), hampir semuanya merupakan keturunan Daeng Celak, kecuali Raja Ali YDM V yang merupakan anak dari Daeng Kemboja.

Keterlibatan orang Bugis dalam konflik internal Kerajaan Johor adalah titik awal terbentuknya identitas Melayu Bugis. Mendapatkan jabatan sebagai

Yang Dipertuan Muda (YDM) Riau adalah proses awal dari pembentukan identitas tersebut. Selain jabatan politis, kemudian para bangsawan Bugis dinikahkan dengan bangsawan Melayu yang berasal dari kerabat-kerabat Sultan Sulaiman. Di satu sisi, pernikahan itu menjadi penguat dalam aspek politis, baik bagi pihak Bugis maupun Melayu yang dalam hal ini adalah Sultan Sulaiman. Akan tetapi, di sisi lain pernikahan tersebut melatarbelakangi terbentuk identitas Melayu Bugis.

DAFTAR SUMBER

- Adil, Haji Buyong bin. 1980. *Sejarah Johor*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pelajaran Malaysia.
- Ahmad, A. Samad. 1985. *Kerajaan Johor-Riau*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pelajaran Malaysia.
- Ahmad, Jasni bin. 2016. “Bugis di Kedah 1600-1800: Suatu Tinjauan Awal.” *Proceeding of ICECRS* 1 (1):81-84.
- Andaya, Leonard Y. 1995. “The Bugis-Makassar Diasporas.” *Journal of the Malaysian Branch of the Royal Asiatic Society* 68(1 (268):119-38.
- Barnard, Timothy P. 1994. *Raja Kecil dan Mitos Pengabsahannya*. Pekanbaru: Pusat Pengkajian Melayu Universitas Islam Riau.
- Dahlan, Ahmad. 2014. *Sejarah Melayu*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.

- Daud, Alwi. 2016. "Perkahwinan Aristokrat Bugis dan Melayu Abad ke 18: Kajian Berdasarkan Teks Silsilah Melayu dan Bugis, Hikayat Upu Daeng Menambun dan Hikayat Negeri Johor." Makalah. Seminar Institusi Raja (Siraj IV) Hubungan Luar Kesultanan Melayu, Kuala Lumpur.
- Erman, Erwiza. 2022. "The Karimata Strait: Heritage of Network System and Socio-Political History of Malay Sultanate." *Heritage of Nusantara: International Journal of Religious Literature and Heritage* 11(1):84-112.
- Fahrudin, Ali. 2013. "Pusat Kajian Islam Melayu: Studi Peran Masjid Sultan Riau Masa Lalu." *Jurnal Lektur Keagamaan* 11(2):405-28.
- Fatimah, Raja, dan Adnan. n.d. "Genealogy of Daeng Celak Yang Dipertuan Muda Riau III (3rd Viceroy of Riau)." *Endangered Archives Programme*. Diunduh 25 Juni, 2023 (<https://eap.bl.uk/archive-file/EAP153-4-4>).
- Hamid, Abd Rahman, dan Muhammad Saleh Madjid. 2015. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Ombak.
- Hendraswati, J. Dalle, dan Zulfa Jamalie. 2017. *Diaspora dan Ketahanan Budaya Orang Bugis di Pagatan Tanah Bumbu*. Yogyakarta: Kepel Press.
- Hooker, Virginia Matheson. 1991. *Tuhfat Al-Nafis : Sejarah Melayu-Islam, Terj. Ahmad Fauzi Basri*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pendidikan Malaysia.
- Ikhwan, Ikhwan. 2016. "Machiavelli: Pembeneran Kekerasan dalam Politik Kekuasaan." *AL-IJTIMA' I - International Journal of Government and Social Science* 2(1):101-25.
- Kadir, Daud. 2008. *Sejarah Kesultanan Lingga-Riau*. Lingga: Pemerintah Kabupaten Lingga.
- Kuntowijoyo. 2013. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Mansur, Raja Abdurrahman. 1983. "Silsilah Hubungan Raja-Raja Melayu/Bugis Johor Riau/Lingga dan Selangor." Naskah tidak diterbitkan.
- Melay, Ridwan. 1999. "Riau Lingga Dilema Kekuasaan dan Implikasi Perdagangan 1784-1824." Tesis, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Mustamin, M. Hasyim, Makmur Haji Harun, dan Mohd Kasturi Nor. 2021. "Siri' dan Pesse': Pembentuk Nilai dan Identiti Melayu Bugis." *Journal of Human Development and Communication* 10(1):15-23.
- Netscher, E. 2002. *Belanda di Johor dan Siak (1602 - 1865), Terj. Wan Galib*. Siak: Bina Pustaka.
- Nordin, Mardiana. 2021. "Penguatan Kuasa Melayu: Perkembangan Politik dan Pentadbiran Kesultanan Johor Sehingga Abad ke-18." *Jebat: Malaysian Journal of His-*

- tory, Politics and Strategic Studies* 48(2):108-37.
- Padilla, Amado M., dan William Perez. 2003. "Acculturation, Social Identity, and Social Cognition: A New Perspective." *Hispanic Journal of Behavioral Sciences* 25(1):35-55.
- Pelras, Christian. 1996. *The Bugis*. Massachusetts: Blackwell Publishers.
- Rahmat, Syahrul. 2019. "Bugis di Kerajaan Melayu: Eksistensi Orang Bugis dalam Pemerintahan Kerajaan Johor-Riau-Lingga-Pahang." *Perada* 2(1):35-44.
- _____. 2020. "Jejak Daeng di Tanah Melayu." dalam *Historisitas Cagar Budaya di Kepulauan Riau*. Batusangkar: Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Sumatra Barat.
- _____. 2021. "Genealogis Melayu Bugis: Kajian Historiografi Terhadap Asal Usul Upu Daeng Lima Bersaudara dalam Sumber-Sumber Melayu." *Perada* 4(2):81-96.
- Rambe, Tappil, Pristi Suhendro Lukitoyo, Syahrul Nizar Saragih, dan Leylia Khairani. 2019. *Sejarah Politik dan Kekuasaan*. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Sani, Amilda. 2020. "Diaspora Bugis dan Perkembangan Perdagangan Kopra di Sumatera pada Awal Abad XX." *Tamaddun: Jurnal Kebudayaan dan Sastra Islam* 20(1):29-41.
- Saripaini, dan Yusriadi. 2016. "Identitas Orang Bugis di Dabong, Kalimantan Barat." *Jurnal Khatulistiwa-Journal of Islamic Studies* 6(2):170-82.
- Sunarti, Linda, Raisye Soleh, dan Noor Fatia Lastika Sari. 2022. "The Bugis Diaspora in Malaysia: A Quest for Cultural Identity on Collective Memories Through Social Media." *Cogent Arts & Humanities* 9(1):1-16.
- Susiyanto. 2020. *Interaksi Antar Etnik dalam Kerangka Etnisitas: Teori, Konsep dan Implentasinya*. Bengkulu: Zara Abadi.
- Sutherland, Heather. 2001. "The Makassar Malays: Adaptation and Identity, c. 1660-1790." *Journal of Southeast Asian Studies* 32(3):397-421.
- _____. 2017. "By The Numbers: Makassar's Trade, Centralized Statistics and Local Realities." *Masyarakat Indonesia* 39(2):289-305.
- Suwitha, I. Putu Gede. 2017. "Identity and Ethnicity of Bugis Community in Bali: An Historical Perspective." *Paramita: Historical Studies Journal* 27(2):141-53.
- Syawaludin, Mohammad. 2017. *Teori Sosial Budaya dan Methodenstreit*. Palembang: Noer Fikri.
- Tamrin. 2015. "Perluasan Makna Kata Sapaan Daeng dalam Bahasa Makassar." *Sirok Bastra* 3(1):45-52.

Umar. 2018. “*Perantau Bugis dalam Narasi Sejarah: Sebuah Kritik Historiografi.*” Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.

Wati, Arena. 1973. *Silsilah Melayu dan Bugis*. Kuala Lumpur: Penerbitan Pustaka Antara.

